

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGUATAN PERAN DAN
FUNGSI APARATUR PENGAWAS INTERN PEMERINTAH
(APIP) DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI
DI KOTA PADANG PANJANG**

TESIS

*Diajukan Sebagai Syarat untuk Mendapatkan Magister Administrasi Publik
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

OLEH :

RICO CANDRA

2120842007



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025**

ABSTRAK

Nama : Rico Candra
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul : Implementasi Kebijakan Penguatan Peran dan Fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Kota Padang Panjang.

Pemerintah Pusat telah mengeluarkan kebijakan baru terkait dengan Penguatan Peran dan Fungsi APIP, yaitu menerbitkan Surat Edaran Bersama yang ditujukan kepada seluruh Gubernur/ Bupati/Walikota seluruh Indonesia, yaitu antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Nomor 700.1/3013/SJ, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP RI) Nomor HK.01.00/SE.3/K/D3/2024 Tanggal 8 Juli 2024 perihal Penguatan APIP Daerah. Penguatan APIP yang dimaksud adalah penguatan dari sisi SDM, penguatan anggaran pengawasan, dan penguatan kelembagaan APIP. Implementasi kebijakan ini mendapat tanggapan yang berbeda dari berbagai Pemerintahan Daerah, salah satunya Pemerintah Kota Padang Panjang. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat ini bertujuan untuk mencegah tindak pidana korupsi pada Pemerintah Daerah. Salah satu ciri APIP yang kuat adalah APIP yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, sehingga perlu adanya kebijakan untuk menguatkan APIP itu sendiri. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk melihat implementasi kebijakan ini dengan menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III (1980) menekankan pentingnya empat variabel utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Padang Panjang belum sepenuhnya berhasil mengimplementasikan kebijakan penguatan peran dan fungsi APIP. Dari keempat variabel yang dikemukakan oleh Edward, semuanya punya catatan khusus, karena hanya kebijakan penguatan kelembagaan APIP yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang, sehingga wajar jika masih terjadi kasus korupsi pada Pemerintah Kota Padang Panjang. Pemerintah Kota Padang Panjang diharapkan dapat mengimplementasikan seluruh kebijakan penguatan peran dan fungsi APIP, tidak hanya kebijakan penguatan kelembagaan, akan tetapi kebijakan penguatan SDM APIP dan kebijakan pemenuhan anggaran mutlak harus segera dilaksanakan, sehingga seluruh kebijakan ini dapat diimplementasikan secara utuh oleh Pemerintah Kota Padang Panjang dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Implementasi, Penguatan APIP, Pencegahan Korupsi

ABSTRACT

Name : Rico Candra
Program Study : Magister Administrasi Publik
Title : Implementasi Kebijakan Penguatan Peran dan Fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Kota Padang Panjang.

The Central Government has issued a new policy aimed at strengthening the role and function of APIP (Government Internal Supervisory Apparatus), through the issuance of a Joint Circular Letter addressed to all Governors, Regents, and Mayors across Indonesia. This circular was jointly issued by the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia (Number 11 of 2024), the Corruption Eradication Commission (KPK RI) (Number 700.1/3013/SJ), and the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP RI) (Number HK.01.00/SE.3/K/D3/2024), dated July 8, 2024, concerning the Strengthening of Regional APIP. This strengthening involves three key aspects: human resources, supervisory budgeting, and institutional development. The implementation of this policy has received varied responses from regional governments, including the Government of Padang Panjang City. The central aim of this policy is to prevent acts of corruption within regional governments. One of the characteristics of a strong APIP is its ability to prevent such acts, thus necessitating policies that enhance its capacity. This study employs a descriptive qualitative method to examine the implementation of the policy, using Edward III's (1980) theory of policy implementation, which emphasizes four critical variables for successful implementation: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings indicate that the Padang Panjang City Government has not yet fully succeeded in implementing the policy. The Padang Panjang City Government is expected to be able to implement all policies to strengthen the active role and function, not only institutional strengthening policies but also policies to strengthen APIP human resources and budget fulfillment policies must be implemented immediately so that all these policies can be implemented in their entirety by the Padang Panjang City Government in order to prevent criminal acts of corruption.

Keywords: Implementation, Penguatan APIP, Corruption Prevention